



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PERBANDINGAN PENILAIAN  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN  
PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**



**RIMA MELATI**  
**07 153 075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'alamin...

Puji dan syukur Penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya sehingga Penulis dapat melaksanakan penelitian sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, pengarahan, dan bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Asril dan Ibunda Afrida, atas doa dan segala-galanya.
2. Uda Rennol, Niren, Nirit&Bang Firman, Bang Rio dan Rahmad, atas dukungannya yang berlimpah.
3. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi, S.E, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. H. Yuskar, S.E, M.A, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Ibu Dra. Warnida, M.M, Ak selaku dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Rinaldi Munaf, M.M, CPA, Ak selaku dosen penelaah dalam seminar skripsi Penulis.
7. Bapak Suhandi, S.E, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing akademik Penulis.
8. Ibu Dra. Hj. Sri Daryanti Zen, MBA, Ak dan Ibu Dra. Raudhatul Hidayah, M.E, Ak selaku dosen penguji Penulis dalam ujian komprehensif.

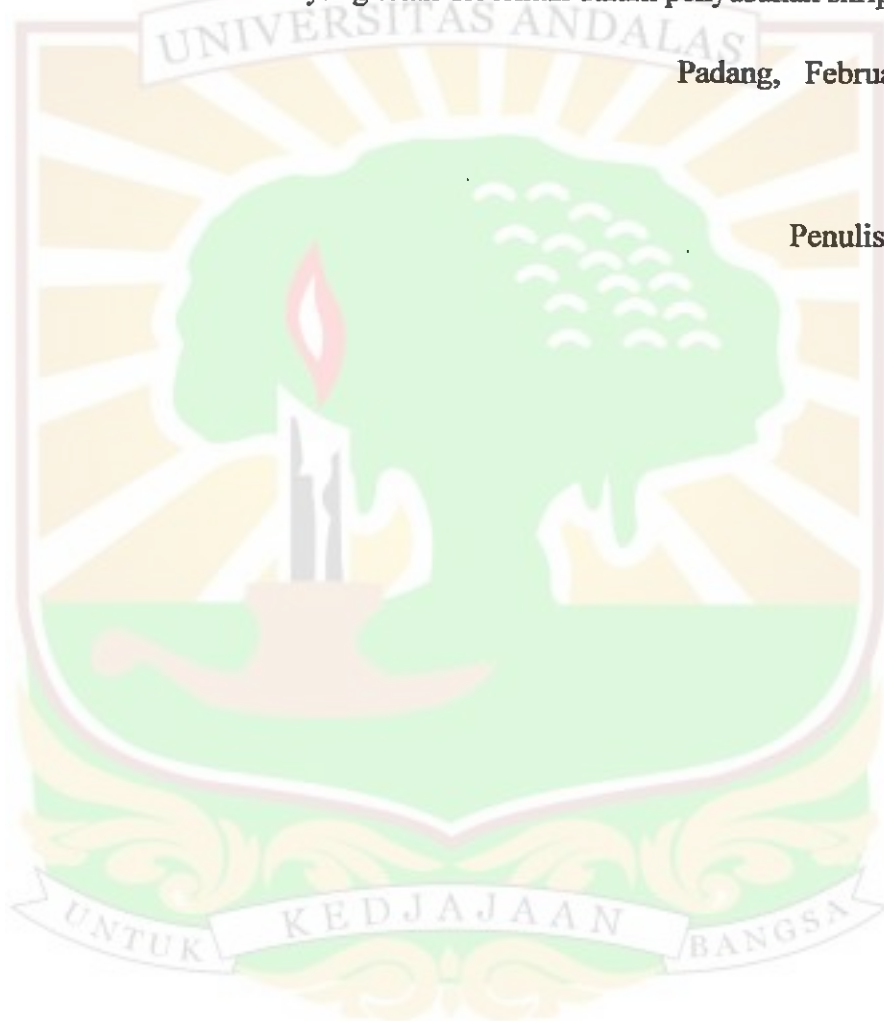
9. Semua dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan pemikiran-pemikiran yang berguna bagi Penulis dalam memandang suatu hal serta asisten dosen yang telah mendampingi perkuliahan selama masa studi.
10. Karyawan biro Jurusan Akuntansi, Mama, Ni Epa dan Bang Ari atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama ini.
11. Keluarga besar di Seberang Padang, keluarga besar di Kampuang Jua&Jondul Rawang, keluarga Uni Erni di Qatar serta sanak famili yang telah membantu dan mendukung Penulis.
12. Sahabat-sahabat Penulis :
  - Popi, Uum, Uul, Gege, atas doa dan tambahan semangatnya di setiap waktu. Geeloo (^\_^)
  - Helen, Ade, Aty, Botak, Cagaw, Ary, Niko, Fanny, Aca atas dukungannya.
  - Pipit-partner selama kuliah, seminar dan kompre, banyak hal ya pit☺
  - Rany, Mega, Yuyu, Flori, Amir-Anda, dan Fitri atas persahabatannya, doa, semangat dan dukungannya.
  - Marta, Rengga, Dewi, Caye atas ilmu dan diskusinya untuk persiapan kompre.
  - Madia “mamaik”, makasi banyak atas semuanya... Semua berawal dari mamaik ^\_\*
  - Yeni-peje konsumsi waktu seminar-yang sangat membantu, Diah, Ilen, Ija, Tya, kak Ola, Uci, Yola, Ricka-Bos, kak Dila, Laila, Ridzka, atas dukungannya.
  - Bang Monda, Ikrar, Angga, Hani, Hendri atas bantuan, diskusi dan ilmunya, semuanya hanya “permainan pikiran”, ya? ☺
  - Bang Pane, teman dalam seminar skripsi.
  - Semua kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2010 di Talang Babungo, Hiliran Gumanti, Solok.

- Semua sahabat dan teman di Akuntansi 07, terima kasih atas masa-masa selama studi.
- Senior Akuntansi 2004, 2005, dan 2006.
- Adik-adik yang seperjuangan, Indah, Lolli, Tutik, dan Akuntansi 08, dan seterusnya..

13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Padang, Februari 2012

Penulis



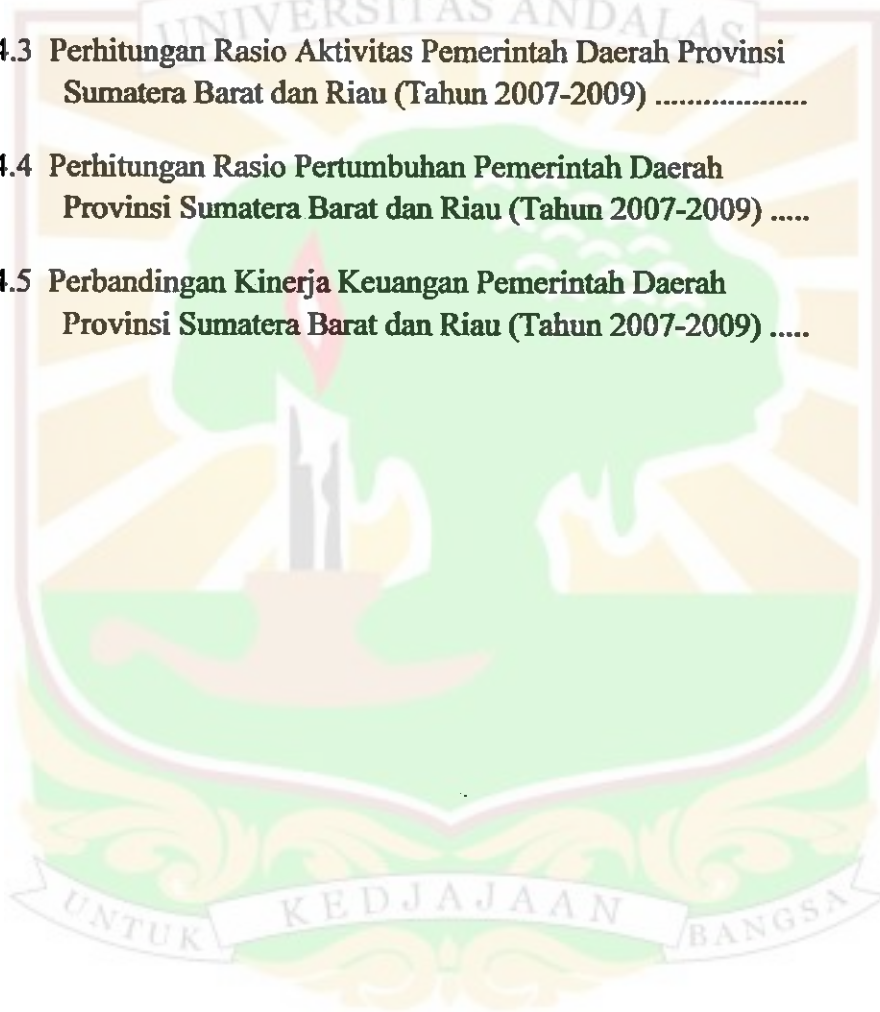
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
2.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah .....	9
2.2 Konsep Akuntabilitas .....	12
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah .....	15
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ....	21
2.5 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Keuangan .....	27
2.6 Penelitian Terdahulu .....	34
2.7 Kerangka Berpikir .....	35

2.8	Hipotesis Penelitian .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>
3.1	Desain Penelitian .....	37
3.2	Variabel dan Pengukuran .....	37
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	38
3.4	Data dan Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5	Metode Analisis Data .....	41
3.5.1	Analisis Rasio Keuangan .....	41
3.5.2	Analisis Uji Beda <i>Kolmogorof Smirnov</i> .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
4.1	Rasio Kemandirian .....	43
4.2	Rasio Efektivitas .....	45
4.3	Rasio Aktivitas .....	47
4.4	Rasio Pertumbuhan .....	49
4.5	Analisis Uji Beda dengan <i>Kolmogorof Smirnov</i> .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>54</b>
5.1	Kesimpulan .....	54
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	55
5.3	Saran .....	55
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>		<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	43
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	45
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	47
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	49
Tabel 4.5 Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	52



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Perbandingan Tren Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	44
Gambar 4.2 Perbandingan Tren Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) ...	46
Gambar 4.3 Perbandingan Tren Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	48
Gambar 4.4 Perbandingan Tren Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	48
Gambar 4.5 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	50
Gambar 4.6 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	50
Gambar 4.7 Perbandingan Pertumbuhan Belanja Rutin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	51
Gambar 4.8 Perbandingan Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009) .....	51
Gambar 4.9 Hasil uji beda dengan <i>Kolmogorov Smirnov</i> .....	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini bangsa Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan bersifat sentralistik yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan pada pendapatan dan pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sumber daya potensial yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagian besar dikirim ke pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 muncul karena adanya pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada daerah yang

berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi bersifat luas karena kewenangan justru berada pada daerah (seperti pada negara federal), disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah (Surbakti, 2001). Hal itu meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia (Pristwanto, 2001).

Kedua undang-undang tersebut juga memberikan makna otonomi atau desentralisasi yang tegas dan sesuai dengan makna asli yang terkandung di dalamnya, yaitu kebebasan, *self independence* dan *dispersion of power* dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sehingga dalam kerangka formulasi dan implementasi otonomi, yang dituntut oleh daerah-daerah sebenarnya adalah adanya keadilan, baik keadilan yang menyangkut permasalahan pembagian dan penggunaan kewenangan maupun yang berkenaan dengan keuangan dan pendapatan. Karena selama ini, dalam hal kewenangan dan keuangan selalu terletak di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanyalah sebagai pelaksana saja (Affandi, 2001).

Berkaitan dengan keuangan daerah, masing-masing daerah dihadapkan pada permasalahan pengelolaan (manajemen) keuangan baik pada sisi penerimaan maupun belanja/pengeluaran daerah. Manajemen pengelolaan daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan dan

penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Untuk itu dalam merespon tuntutan yang semakin banyak beragam tersebut pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen keuangan publik yang handal. Hal ini sangat penting karena masalah buruknya manajemen keuangan publik telah mengakibatkan anggaran publik yang tidak efektif dan efisien (seperti bocornya anggaran) dan kinerja sektor publik yang mengecewakan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana oleh pemerintah daerah yang benar-benar terarah untuk pelayanan publik yang optimal melalui proses penganggaran secara baik.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordriawan, 2007 : 141). Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 : 38).

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan. Wujud dari keterbatasan tersebut dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagian besar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (Suwarno, 2007 : 2).

Penilaian kinerja keuangan dengan analisis keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Kita dapat mengukur kinerja suatu pemerintahan dengan menggunakan angka-angka yang terdapat di dalam Laporan Realisasi APBD.

Kita dapat mengukur kinerja pemerintah daerah dengan membandingkan angka realisasi anggaran dengan angka anggaran, membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya atau membandingkan kinerja suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain yang terletak di wilayah yang berdekatan dan kondisinya yang hampir sama. Setelah dilakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan, akan lebih baik jika dilakukan pengukuran kinerja secara berkesinambungan agar dapat dilihat bagaimana kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah dan seberapa besar kenaikan atau penurunan kinerja pemerintah daerah tersebut. Bastian (2006 : 275), pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pengukuran kinerja pemerintah dilakukan selama beberapa periode, tidak hanya untuk satu periode saja.

Penulis tertarik meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat karena merupakan tempat domisili penulis saat ini dan dibandingkan

dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau karena letak kedua provinsi ini yang berdekatan secara geografis, yang sangat berbeda dalam penerimaan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009, yakni pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh *disclaimer* (BPK tidak memberikan pendapat) sedangkan pemerintah daerah Provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau.

- c. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian adalah:

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin ada dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau.
- b. Memberi pengetahuan bagi penulis mengenai cara menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Menambah kepustakaan dan wawasan bagi pembaca.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, dan pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data dari variabel penelitian,

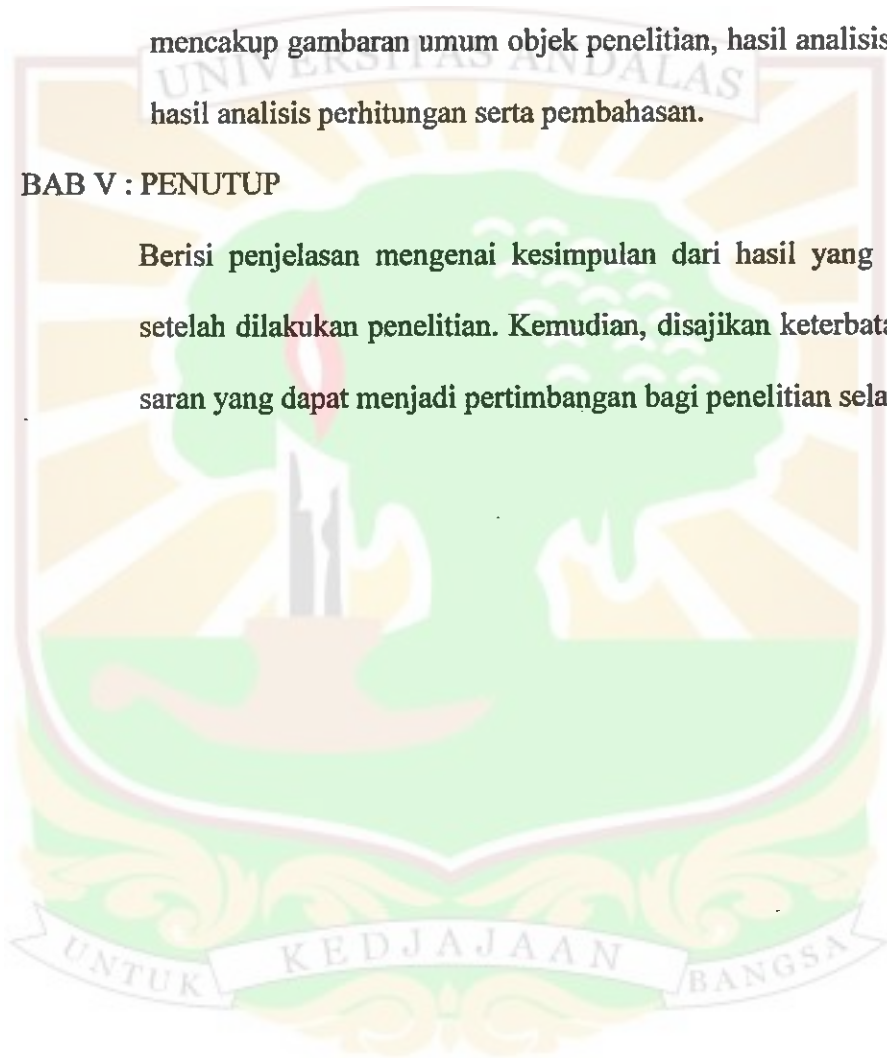
metode pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis dalam penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan serta pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Kemudian, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Veizal Rivai (2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Pengertian instansi pemerintah dalam Penetapan Kinerja Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabatan dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mardiasmo (2005 : 121), pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum, yaitu (Mardiasmo, 2005 : 122):

- a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
- b) Untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja yakni sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut (Mardiasmo, 2005 : 123):

1. Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

2. Informasi nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator

untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan (Mardiasmo, 2005 : 125).

## 2.2 Konsep Akuntabilitas

Secara sederhana, akuntabilitas (*accountability*) diartikan sebagai pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan manajemen pemerintah, tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BPKP) mendefinisikannya sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Mardiasmo (2005 : 20-22), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*).

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- c. Akuntabilitas program (*program accountability*).

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah.

Affandi (2001) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yakni DPR/DPRD dan masyarakat umum. Sehingga aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas keuangan adalah:

1. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran, artinya setiap transaksi yang terjadi harus dapat dilacak otoritasnya.
2. Adanya pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan terhadap aset fisik dan finansial serta mencegah terjadinya pemborosan dan salah arus.

Fungsi dan jenis akuntabilitas yaitu:

#### 1. Fungsi Akuntabilitas

Menurut Douglas (dalam Nurkholis, 2000), dalam bukunya yang berjudul "*Governmental and Nonprofit Organizations: Theory and Practices*" menyatakan bahwa *accountability* mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a) Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu entitas (satuan usaha) tersebut.
- b) Memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor dan masyarakat luas) untuk mereview informasi tersebut.
- c) Mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

#### 2. Jenis Akuntabilitas

Mardiasmo (2005 : 21) mengategorikan akuntabilitas menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accuntability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accuntability*).

Sedangkan Rosjidi (2001 : 145) menyebutkan kedua akuntabilitas tersebut sebagai akuntabilitas internal (*internal accountability*) dan akuntabilitas eksternal (*external accountability*).

a) Akuntabilitas Vertikal (Internal)

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah. Setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya secara *build in* mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Misalnya pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b) Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*public or external accountability and environment*).

### 2.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Mardiasmo, 2005 : 159-160. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Kerangka konseptual SAP dalam Nordiawan, 2007 : 34-36, peranan pelaporan keuangan yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan pokok terdiri atas:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Neraca
- c) Laporan Arus Kas
- d) Catatan atas Laporan Keuangan

Acuan wajib dalam penyusunan laporan keuangan bagi seluruh organ pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yakni Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Mardiasmo (2005 : 161-162), secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- a) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*).

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber

daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b) Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (*accountability and restrospective reporting*).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

c) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d) Kelangsungan organisasi (*viability*).

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e) Hubungan masyarakat (*public relation*).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan

keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*).

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Drebin *et al.* (1981) mengidentifikasi terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan yaitu:

1. Pembayar pajak (*taxpayers*).
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*).
3. Investor.
4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*).
5. Karyawan/pegawai.
6. Pemasok (*vendor*).
7. Dewan legislatif.
8. Manajemen.
9. Pemilih (*voters*).
10. Badan pengawas (*ovefsight bodies*).

Anthony mengklasifikasikan terdapat lima kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik, yakni:

1. Lembaga pemerintah (*governing bodies*).
2. Investor dan kreditor.
3. Pemberi sumber daya (*resource providers*).
4. Badan pengawas (*oversight bodies*).

## 5. Konstituen.

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin *et al.* mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintah saja (Mardiasmo, 2005 : 168-170).

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu (Mardiasmo, 2005 : 171-172):

- a. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yakni:
  - Mengetahui kebijakan pemerintah.
  - Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
  - Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
- b. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
- c. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

#### **2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Wikipedia.org memuat definisi anggaran menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran berfungsi sebagai:

- a. Hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c. Alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
- d. Alat pengendalian unit kerja.
- e. Alat motivasi dan persuasif tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- f. Instrumen politik.
- g. Instrumen kebijakan fiskal.

Anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan (Nordiawan, 2007 : 48):

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain (Nordiawan, 2007 : 48-49):

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

**b. Anggaran sebagai alat pengendalian**

Organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

**c. Anggaran sebagai alat kebijakan**

Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

**d. Anggaran sebagai alat politik**

Dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

**e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi**

Dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

**f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja**

Menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

**g. Anggaran sebagai alat motivasi**

Sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

Tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik yaitu:

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

Wikipedia.org juga memuat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan yang terdiri dari:
  - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
  - b) Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
  - c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa



dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Halim (2007 : 20) menyebutkan unsur-unsur yang dimiliki APBD sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan

4. Periode anggaran biasanya satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2007 : 229-230).

Di dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 dinyatakan laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| (a) Pendapatan        | (e) Penerimaan Pembiayaan  |
| (b) Belanja           | (f) Pengeluaran Pembiayaan |
| (c) Transfer          | (g) Pembiayaan Neto        |
| (d) Surplus (Defisit) | (h) SILPA/SIKPA            |

## **2.5 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Analisis Rasio Keuangan**

Organisasi sektor publik (pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan untuk memberikan *public services* (pelayanan publik) kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum (*law enforcement*), transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu *stake holder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja (*vertical reporting*), tetapi juga kepada masyarakat luas (*horizontal reporting*).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Pengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat

pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system* (sistem penghargaan dan hukuman).

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas.

Halim (2007 : 232), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk (Halim, 2007 : 230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan (Halim, 2007 : 230-231):

- a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
- b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget*, yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Seharusnya APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja (*performance budget*) menurut Pasal 20 PP Nomor 105.

- c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain (Halim, 2007 : 232-241):

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Lain seperti Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi \& Pinjaman}}$$

Kesimpulan ditarik dari rasio tersebut dengan berpatokan pada:

- a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti kinerjanya **buruk** dalam hal kemandirian.

b. Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap kinerjanya **agak baik** dalam hal kemandirian.

c. Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mandiri dengan demikian dianggap kinerjanya **cukup baik** dalam hal kemandirian.

d. Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena benar-benar mampu dan mandiri dengan demikian dianggap kinerjanya **sangat baik** dalam hal kemandirian.

Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

## 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim (2007 : 234), apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%) berarti daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Semakin tinggi rasio

efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

### Rasio Efektifitas

#### Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996, kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan **sangat efektif** jika nilai rasionya di atas 100 persen, **efektif** jika nilai rasionya 90-100 persen, **cukup efektif** jika nilai rasionya 80-90 persen, **kurang efektif** jika nilai rasionya 60-80 persen dan **tidak efektif** jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin besar persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka semakin kecil dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan. Secara sederhana, rasio aktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh



dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

#### 4. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan terdiri dari:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{x_n}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{x_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{x_n}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{x_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{x_n}}{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{x_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{x_n}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{x_{n-1}}}$$

Keterangan :  $x_n$  = tahun yang dihitung

$x_{n-1}$  = tahun sebelumnya

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Simatupang (2007) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorov Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

Selanjutnya Diana (2008) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima provinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda

*Kolmogorov Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

Elfianti (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)”. Hasil dari penelitian ini yakni kemandirian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah, pemerintah daerah efektif dalam merealisasikan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah masih fokus pada belanja operasi dan peran PAD dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan masih sangat rendah.

Putri Ella Dewi Maharani (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Penilaian Kinerja (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Hasil dari penelitian ini yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja yang baik selama tahun 2007-2008. Kinerja yang baik terlihat dari realisasi pendapatan yang melampaui target, realisasi belanja yang tidak melebihi plafon anggaran, dan tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan Neraca.

## **2.7 Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang terdiri dari indikator kemandirian daerah, efektivitas dan aktivitas keuangan daerah serta analisis pertumbuhan. Dari empat indikator ini akan dilakukan pemeringkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Selanjutnya juga akan dilihat perubahan kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat

dan Riau apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat dan Riau.



### 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

- $H_0$  : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau
- $H_a$  : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau dengan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan pada masing-masing provinsi tersebut. Variabel kinerja keuangan daerah yang akan diteliti meliputi empat indikator, yaitu kemandirian daerah, efektivitas dan aktivitas keuangan daerah serta pertumbuhan pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

#### **3.2 Variabel dan Pengukuran**

Variabel yang akan diamati yaitu kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya, keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan APBD, aktivitas pemerintah daerah dalam belanja operasi dan pembangunan atau modal serta pertumbuhan kemampuan pemerintah daerah dari periode ke periode lainnya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, aktivitas, dan pertumbuhan. Kinerja kemandirian dinilai dengan jika rasio kemandirian makin besar maka ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat makin rendah. Kinerja pemerintah daerah dinilai efektif jika menghasilkan rasio 1 (satu) atau 100%. Kinerja aktivitas dinilai baik jika belanja modal/pembangunan

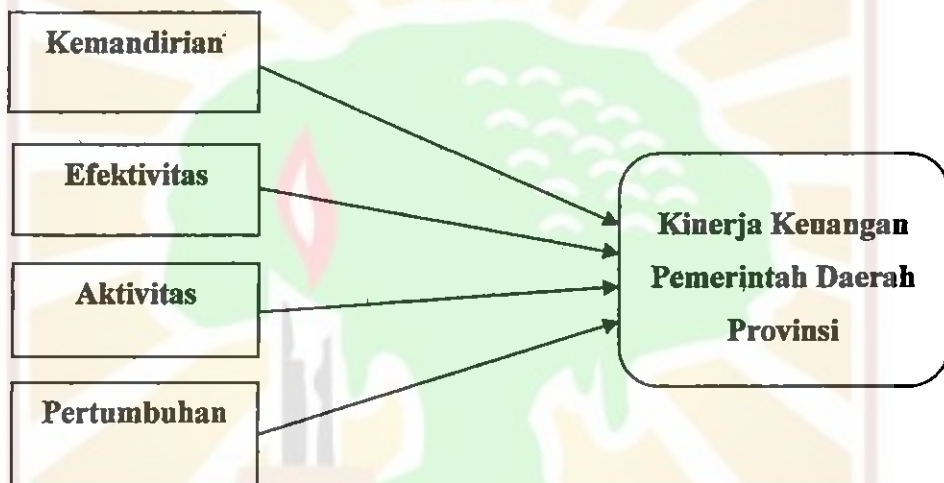
yang dilakukan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja rutin/operasi pada tahun anggaran tersebut. Kinerja pertumbuhan dinilai dengan membandingkan realisasi anggaran tahun saat ini dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersebut dalam satuan moneter sebagai bentuk pertanggungjawabannya ke pemerintah pusat dan masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan (Halim, 2007 : 232-241) yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Rasio keuangan tersebut dihitung dengan menggunakan angka-angka yang terdapat pada Laporan Realisasi APBD.
2. Kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007 : 128).
3. Efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Mahmudi, 2007 : 129).

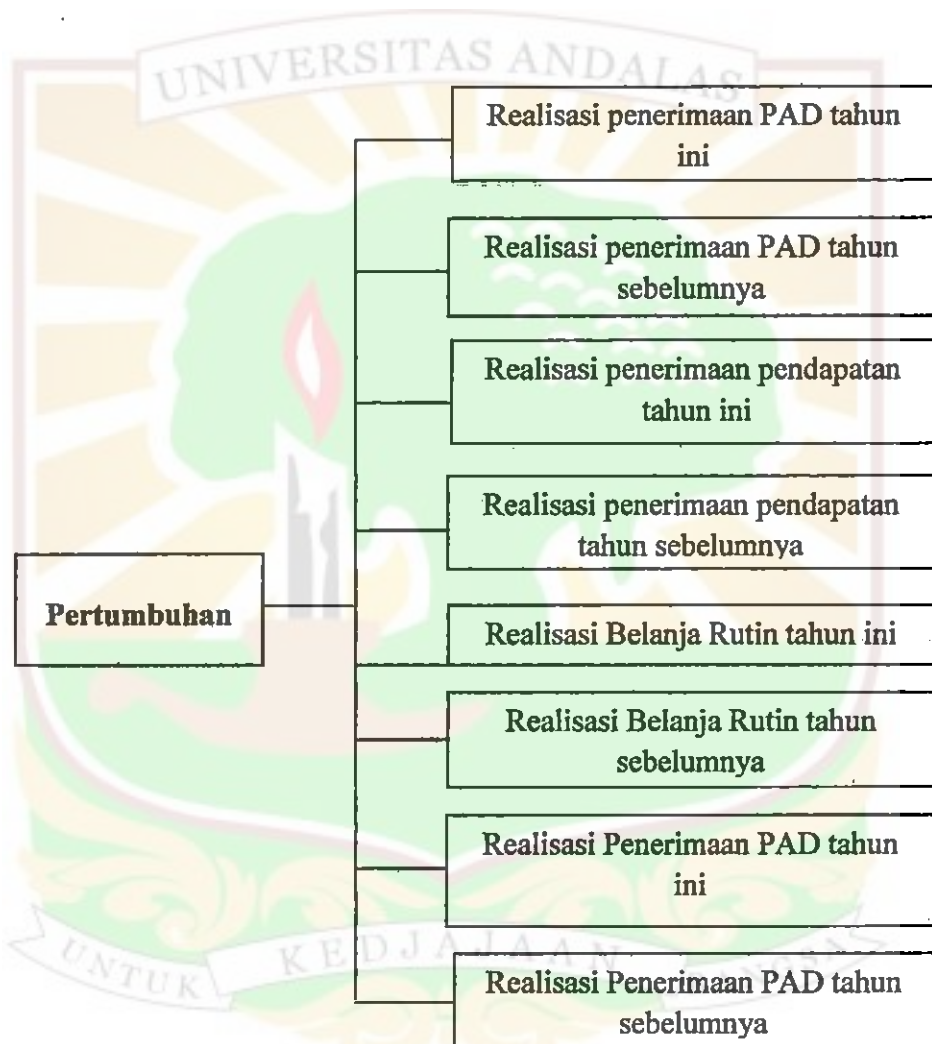
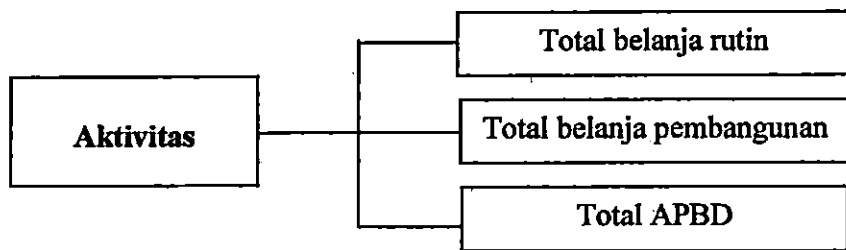
4. Aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya.
5. Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Dimensi dari variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:



Elemen dari dimensi yang akan diamati:





### 3.4 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang diperoleh melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan



Keuangan RI dengan alamat [www.djpk.depkeu.co.id](http://www.djpk.depkeu.co.id). Selain itu, juga diperoleh data dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dengan berkunjung ke lokasinya.

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Rasio Keuangan

Untuk menganalisis data dan informasi, penulis menggunakan analisis kuantitatif berupa analisis rasio kinerja yang dikembangkan oleh Halim (2007 : 232-241) meliputi:

(1) Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi \& Pinjaman}}$$

(2) Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

(3) Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

(4) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{xn}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{xn-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{x_n}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{x_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{x_n}}{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{x_{n-1}}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{x_n}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{x_{n-1}}}$$

Keterangan :  $x_n$  = tahun yang dihitung  
 $x_{n-1}$  = tahun sebelumnya

### 3.5.2 Analisis Uji Beda *Kolmogorov Smirnov*

Pengujian *Kolmogorov Smirnov* dilakukan untuk uji beda dengan satu sampel.

Pada penelitian ini *Kolmogorov Smirnov* dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Untuk mengetahuinya, hal tersebut diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

$H_a$  : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Menurut Sugianto (2007 : 318) jika nilai *asympt sig* (*asymptotic significance*) hasil pengujian lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, sebaliknya jika *asympt sig* hasil pengujian kurang dari 0,05 maka  $H_a$  diterima.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data berupa laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau tahun 2007 sampai tahun 2009 dengan tujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau lalu dibandingkan kinerja dari kedua pemerintah daerah tersebut. Dengan melakukan perhitungan menggunakan data yang berasal dari APBD dan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau tahun 2007 sampai tahun 2009 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 4.1 Rasio Kemandirian (%)

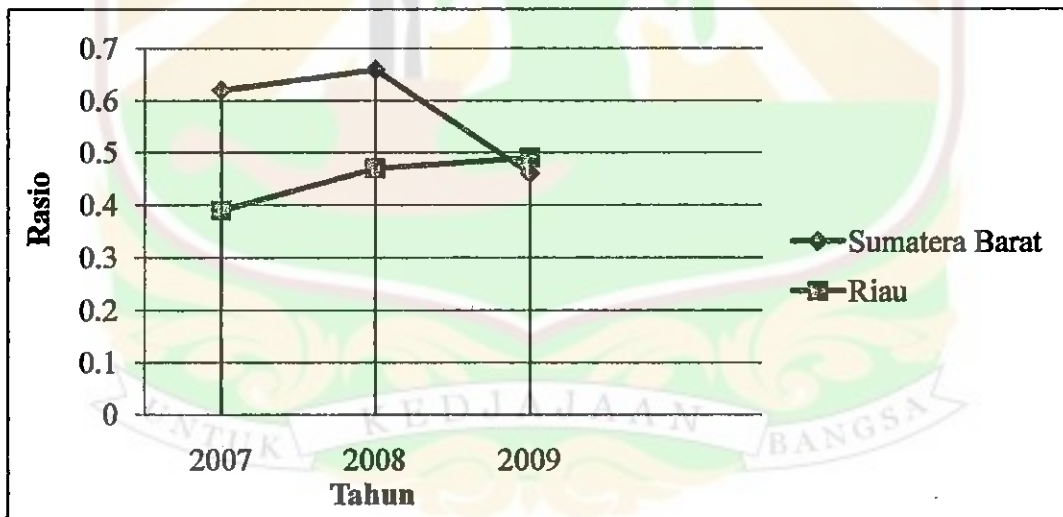
**Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**

No.	Provinsi	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata
1.	Sumatera Barat	61.50	66.29	46.22	58.00
2.	Riau	38.97	46.85	49.16	44.99

Dari hasil perhitungan rasio di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Barat lebih baik dibandingkan Provinsi Riau pada tahun 2007 dan 2008 sedangkan pada tahun 2009 tingkat kemandirian Provinsi Riau lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemandirian Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lain hal Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2009. Pada tahun 2007 dan 2008 kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi sedang, dikatakan

kinerjanya cukup baik. Pada tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat dengan kemampuan keuangan rendah dan kinerjanya agak baik. Provinsi Riau memiliki kemampuan keuangan rendah selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai tahun 2009, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan kinerjanya agak baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara rata-rata selama tiga tahun terakhir, kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat lebih baik daripada Provinsi Riau sehingga dapat dikatakan kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat juga lebih baik dibandingkan pemerintah daerah Provinsi Riau. Perbandingan tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.1 Perbandingan Tren Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



Tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Barat cenderung berfluktuasi, mengalami peningkatan lalu menurun di tahun berikutnya. Tingkat kemandirian Provinsi Riau meningkat tiap tahun sehingga bisa dikatakan stabil. Pada tahun 2007

dan 2008, tingkat kemandirian kedua provinsi berbeda cukup jauh namun pada tahun 2009, tingkat kemandirian kedua pemerintah daerah provinsi hampir sama yang terlihat di kurva yang bersinggungan.

#### 4.2 Rasio Efektivitas

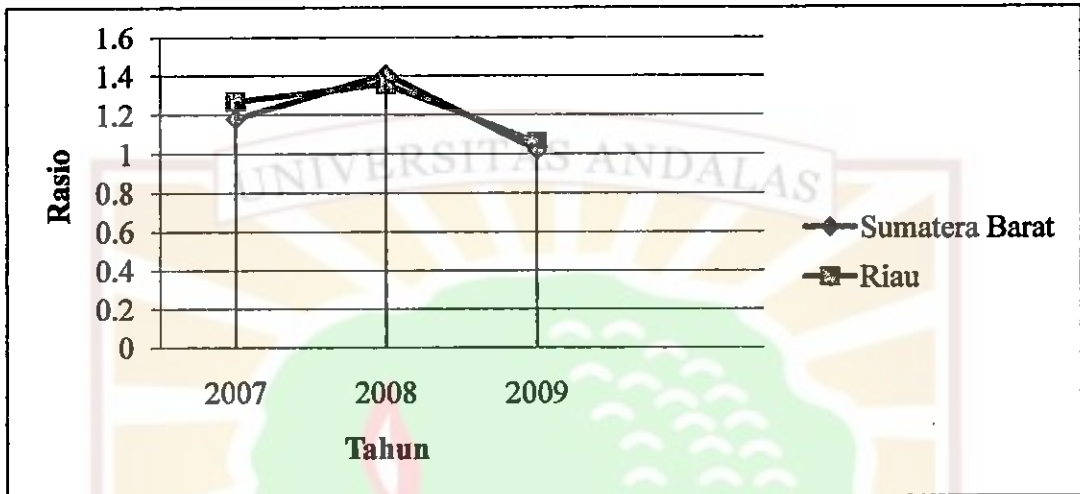
**Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**

No.	Provinsi	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata
1.	Sumatera Barat	1.18	1.41	1.02	1.20
2.	Riau	1.27	1.36	1.06	1.23

Dari hasil di atas didapatkan bahwa Provinsi Riau memiliki tingkat keefektifan yang lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 dan 2009 sedangkan pada tahun 2008, Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat keefektifan yang lebih baik daripada Provinsi Riau. Secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau sangat efektif karena rasio efektivitas yang besar dari 1 (100%) namun secara rata-rata, efektivitas Provinsi Riau lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan efektivitas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dapat dilihat di gambar berikut ini.

**Gambar 4.2 Perbandingan Tren Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



Efektivitas kedua provinsi hampir sama besarnya pada tahun 2007, 2008, dan 2009 dilihat dari kurva yang bersinggungan. Namun secara rata-rata dari tiga tahun berturut-turut, Provinsi Riau memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat. Tingkat efektivitas dari kedua pemerintah daerah provinsi dikatakan sangat efektif karena tingkat efektivitas di atas 100%.

### 4.3 Rasio Aktivitas

**Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**

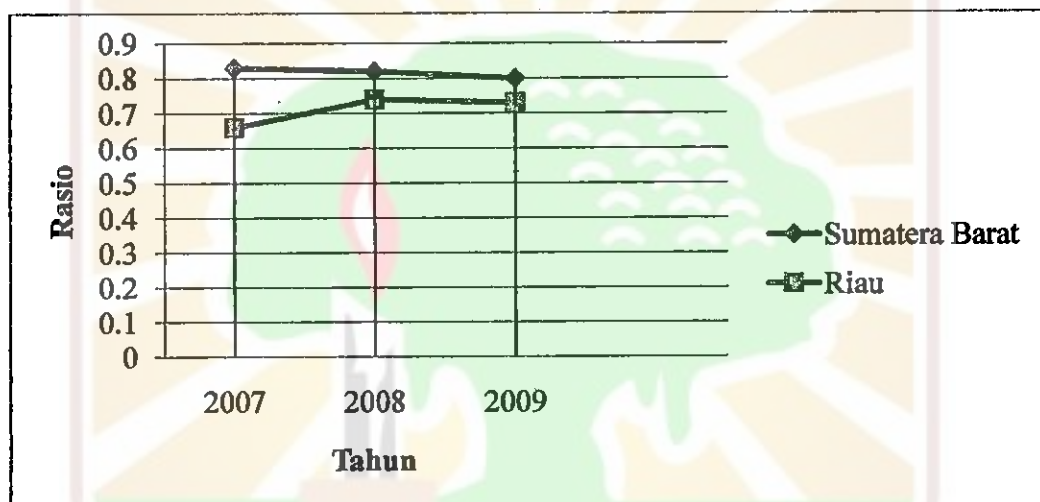
No.	Rasio/Provinsi	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata
<b>1.</b>	<b>Rasio Belanja Rutin terhadap APBD</b>				
a.	Sumatera Barat	0.83	0.82	0.80	0.80
b.	Riau	0.66	0.74	0.73	0.71
<b>2.</b>	<b>Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD</b>				
a.	Sumatera Barat	0.17	0.18	0.20	0.20
b.	Riau	0.34	0.26	0.27	0.29

Dari perhitungan di atas, didapatkan hasil bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki rasio aktivitas yang lebih tinggi yakni pada rasio belanja rutin terhadap APBD daripada Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio belanja pembangunan terhadap APBD, Provinsi Riau memiliki rasio yang lebih tinggi daripada Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa aktivitas Provinsi Sumatera Barat lebih besar untuk membiayai belanja rutin sedangkan Provinsi Riau lebih banyak beraktivitas untuk belanja pembangunan. Aktivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam belanja rutin mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan belanja modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Aktivitas Provinsi Riau dalam belanja rutin dan belanja modal mengalami peningkatan dan penurunan, dimana saat terjadi peningkatan belanja rutin disertai dengan penurunan belanja modal dan saat peningkatan belanja modal maka belanja rutin menurun. Kesimpulannya, kinerja pemerintah daerah Provinsi Riau lebih baik daripada pemerintah daerah Provinsi

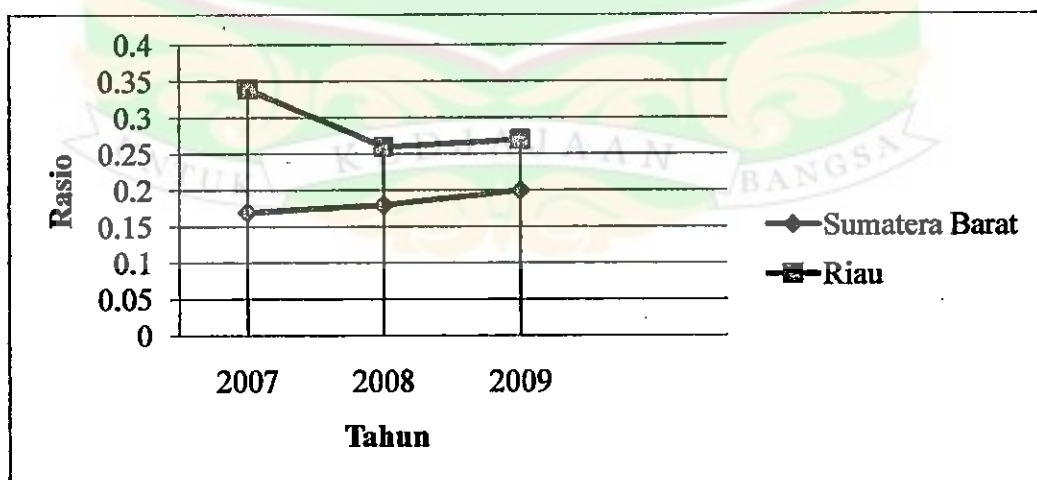
Sumatera Barat karena kinerja aktivitas dinilai baik jika aktivitas belanja modal yang lebih besar dari belanja rutin.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat perbandingan rasio belanja rutin dan belanja modal pada kedua provinsi sebagai berikut ini:

**Gambar 4.3 Perbandingan Tren Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



**Gambar 4.4 Perbandingan Tren Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**





#### 4.4 Rasio Pertumbuhan

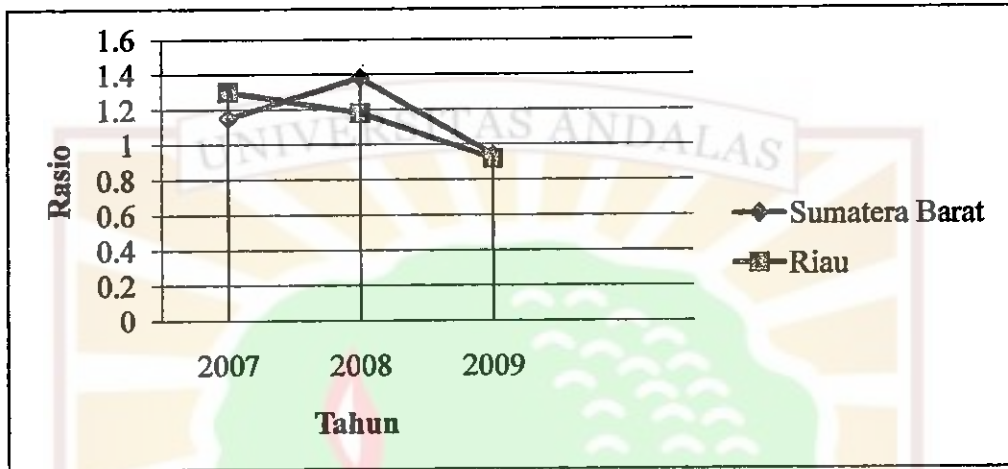
**Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**

No.	Rasio/Provinsi	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Rata-rata
<b>1.</b>	<b>Rasio Pertumbuhan PAD</b>				
a.	Sumatera Barat	1.15	1.38	0.94	1.15
b.	Riau	1.30	1.18	0.92	1.13
<b>2.</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Pendapatan</b>				
a.	Sumatera Barat	1.21	1.35	1.18	1.25
b.	Riau	0.95	1.22	0.78	0.98
<b>3.</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin</b>				
a.	Sumatera Barat	1.30	1.30	1.16	1.24
b.	Riau	0.99	1.15	0.87	1
<b>4.</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan</b>				
a.	Sumatera Barat	1.04	1.40	1.28	1.31
b.	Riau	1.07	0.79	0.94	0.95

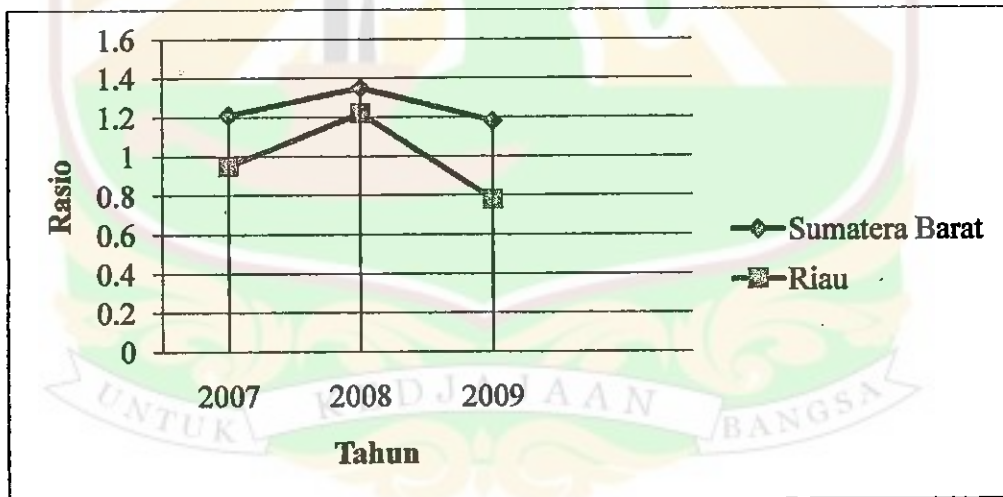
Dari perhitungan di atas, dapat kita ketahui bahwa PAD Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Riau pada tahun 2008 dan 2009. Pertumbuhan PAD Provinsi Riau terus mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pada tiga tahun pengamatan lebih baik daripada pemerintah daerah Provinsi Riau yakni tahun 2007 sampai 2009. Rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja modal Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 sampai 2009 lebih besar daripada Provinsi Riau.

Perbandingan rasio pertumbuhan pada kedua provinsi disajikan di bawah ini:

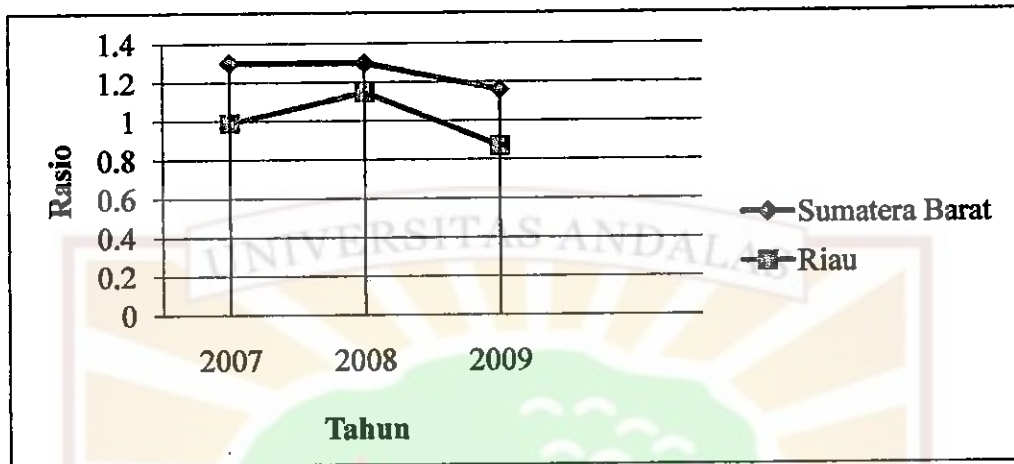
**Gambar 4.5 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



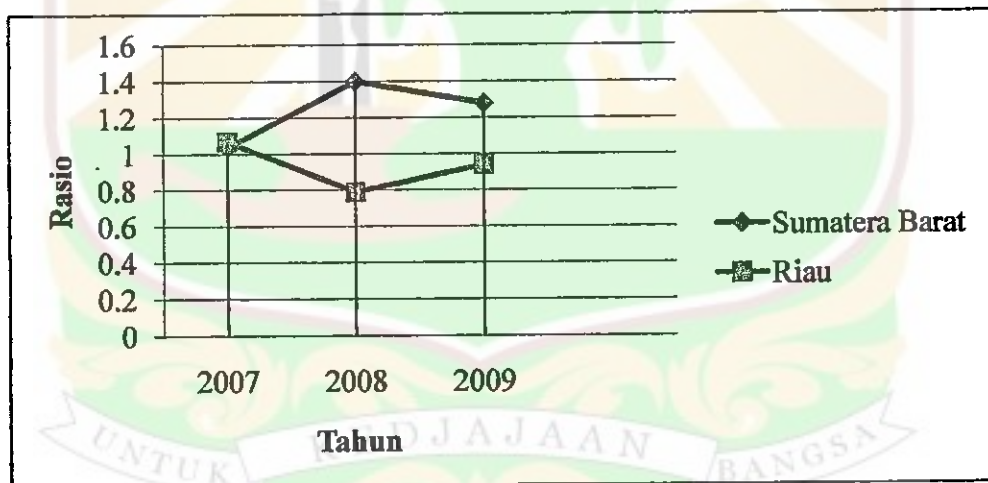
**Gambar 4.6 Kurva Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



**Gambar 4.7 Kurva Perbandingan Pertumbuhan Belanja Rutin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



**Gambar 4.8 Kurva Perbandingan Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**



#### 4.5 Analisis Uji Beda dengan *Kolmogorov Smirnov*

Dari perhitungan di atas, maka akan didapatkan rasio-rasio sebagai ukuran kinerja seperti di dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5 Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)**

No.	Provinsi	Kemandirian	Efektivitas	Aktivitas	Pertumbuhan	Rata-rata
1.	Sumbar	0.59	1.2	1.32	1.24	1.09
2.	Riau	0.45	1.23	0.5	1.02	0.8

Rasio tersebut akan diuji dengan *Kolmogorov Smirnov* pada aplikasi SPSS versi 17 untuk didapatkan hasil apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Uji *Kolmogorov Smirnov* merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji *Kolmogorov Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji *Kolmogorov Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, dengan kata lain, data tersebut tidak normal (<http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-normalitas-dengan-kolmogorov.html>).

Untuk mengetahui hal tersebut di atas diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

$H_a$  : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Gambar 4.9 Hasil Uji Beda dengan *Kolmogorov Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Sumbar	riau
N			4	4
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		1.0875	.8000
	Std. Deviation		.33540	.38549
Most Extreme Differences	Absolute		.381	.282
	Positive		.244	.282
	Negative		-.381	-.216
Kolmogorov-Smirnov Z		.763	.564	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.606	.909	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai *asympt* lebih dari 0.05 ( $0.606 > 0.05$  dan  $0.909 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti tidak ada perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 dan 2008 lebih baik dibandingkan pemerintah daerah Provinsi Riau. Pada tahun 2009, pemerintah daerah Provinsi Riau memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik daripada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Provinsi Riau.
2. Tingkat efektivitas pemerintah daerah Provinsi Riau pada tahun 2007 dan 2009 lebih tinggi daripada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2008, tingkat efektivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi daripada pemerintah daerah Provinsi Riau. Tingkat efektivitas pemerintah daerah Provinsi Riau secara rata-rata lebih tinggi daripada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Walaupun, kedua pemerintah daerah tersebut sama-sama dikategorikan sangat efektif.
3. Rasio aktivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam belanja rutin lebih besar daripada pemerintah daerah Provinsi Riau selama tiga tahun pengamatan. Rasio aktivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam belanja pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah Provinsi Riau selama tiga tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan

pemerintah daerah Sumatera Barat cenderung melakukan belanja rutin yang lebih besar daripada belanja pembangunan sedangkan pemerintah daerah Provinsi Riau melakukan belanja pembangunan yang lebih besar daripada belanja pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat namun porsi belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan.

4. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat lebih baik dibandingkan pemerintah daerah Provinsi Riau selama tiga tahun pengamatan.
5. Hasil uji beda dengan *Kolmogorov Smirnov* yakni tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diperoleh karena tidak adanya pemisahan biaya yang jelas untuk kegiatan pemungutan PAD.

## **5.3 Saran**

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan indikator yang lainnya.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah lamanya periode penelitian untuk didapatkan hasil yang lebih memperlihatkan perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 Nomor 2  
(<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008042271/jurnal-akuntansi-pemerintah/studi-atas-belanja-modal-pada-anggaran-pemerintah-daerah-dalam-hubungannya-dengan-belanja-pemeliharaan-dan-sumber-pendapatan/semua-halaman.html>, diakses 19 Agustus 2011)
- Affandi, Nur Achmad. 2001. *Strategi Pengembangan Akuntansi Pusat dan Daerah*. ([www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id))
- As'ari, Hasan. 2010. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Financial Statistics of Province Governance 2006-2009*. Badan Pusat Statistik : Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga : Jakarta
- Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.  
(<http://dc307.4shared.com/doc/oZryGd0V/preview.html>, diakses 6 September 2011)
- Business News. 2010. *Menyoroti Laporan Keuangan Pemda*. (<http://bataviase.co.id/node/301442>, diakses 6 September 2011)
- Elfianti. 2009. *Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Universitas Andalas
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta
- Maharani, Putri Ella Dewi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Penilaian Kinerja (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Universitas Andalas
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta



- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta
- Nuwibowo, Agus dan Hasan As'ari. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Financial Statistics of Province Governance 2007-2010*. Badan Pusat Statistik : Jakarta
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
([http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri\\_13\\_2006.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf), diakses 8 September 2011)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
([http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri\\_59\\_2007.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_59_2007.pdf), diakses 8 September 2011)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  
([http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.depdagri.go.id%2Fmedia%2Fdocuments%2F2008%2F03%2F04%2FPermen\\_No.04-2008.doc&ei=3R5oTpeKPJHxrQfMu4CECw&usq=AFOjCNGgjkFlm66MDfRF1OUW8Tcwi6wdyA&sig2=hW-gRLVLWf7gmzD1sCn1zA](http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.depdagri.go.id%2Fmedia%2Fdocuments%2F2008%2F03%2F04%2FPermen_No.04-2008.doc&ei=3R5oTpeKPJHxrQfMu4CECw&usq=AFOjCNGgjkFlm66MDfRF1OUW8Tcwi6wdyA&sig2=hW-gRLVLWf7gmzD1sCn1zA), diakses 8 September 2011)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ([http://digilib-ampl.net/file/pdf/PP No 105 Tahun 2000.pdf](http://digilib-ampl.net/file/pdf/PP_No_105_Tahun_2000.pdf), diakses 8 September 2011)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.  
(<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/66/1196.bpkp>, diakses 8 September 2011)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1
- Pristwanto. 2001. *Otonomi : Daerah Wajib Menyusun Laporan Keuangan*. ([www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id))
- Rivai, Veizal. 2004. ([Http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja](http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja))

- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business, Metodologi untuk Penelitian Bisnis*. Salemba Empat : Jakarta
- Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. ([http://www.ksap.org/peraturan/PP\\_71\\_TAHUN\\_2010.pdf](http://www.ksap.org/peraturan/PP_71_TAHUN_2010.pdf), diakses 6 September 2011)
- Sukiadi, H. Tjuk. 2001. *Penyiapan SDM Perbankan Dalam Penyempurnaan Pelaporan Kepada Masyarakat (Studi Kasus BPD)*, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. ([Http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja](http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja))
- Surbakti, Ramlan. 2001. *Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan Faktor Pendukung*. ([www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (<http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-22-1999.pdf>, diakses 8 September 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (<http://www.dephut.go.id/files/UNDANG-UNDANG%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2025%20TAHUN%201999.pdf>, diakses 8 September 2011)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, [www.djpk.depkeu.co.id](http://www.djpk.depkeu.co.id)
- Kolmogorov Smirnov. <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-normalitas-dengan-kolmogorov.html>
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

UNIVERSITAS ANDALAS  
LAMPIRAN

Provinsi	Realisasi Tahun 2006 (Ribu Rupiah)			
	Pendapatan	PAD	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan
Sumbar	1,058,664,160	504,408,100	993,451,780	210,126,560
Riau	3,579,679,040	964,668,290	3,043,609,390	1,358,205,750

Provinsi	Realisasi tahun 2007 (Ribu Rupiah)						APBD Tahun 2007 (Ribu Rupiah)
	Pendapatan	PAD	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Pendapatan Eksternal	Total APBD Belanja	PAD
Sumbar	1,281,399,813	571,607,517	1,241,730,961	259,261,224	929,384,668	1,500,992,185	482,765,593
Riau	3,413,009,700	1,257,064,415	2,972,559,154	1,508,724,965	3,225,398,169	4,482,462,584	990,224,116

Provinsi	Realisasi tahun 2008 (Ribu Rupiah)						APBD Tahun 2008 (ribu rupiah)
	Pendapatan	PAD	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Pendapatan Eksternal	Total APBD Belanja	PAD
Sumbar	1,723,767,565	790,087,768	1,619,585,229	362,102,930	1,191,719,136	1,981,806,904	562,292,000
Riau	4,164,943,199	1,477,579,373	3,418,431,912	1,195,266,683	3,153,383,667	4,630,963,040	1,089,591,000

Propvinsi	Realisasi tahun 2009 (Ribu Rupiah)						APBD Tahun 2009 (Ribu Rupiah)
	Pendapatan	PAD	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Pendapatan Eksternal	Total APBD Belanja	PAD
Sumbar	2,026,241,165	739,747,093	1,875,814,141	462,031,796	1,600,523,354	2,340,270,447	723,758,000.00
Riau	3,231,912,094	1,352,412,744	2,982,495,097	1,119,393,869	2,750,576,222	4,102,988,966	1,276,253,000.00

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI (diolah)